

# RENCANA KERJA

## **BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, BPPKAD Kabupaten Sampang menyusun Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

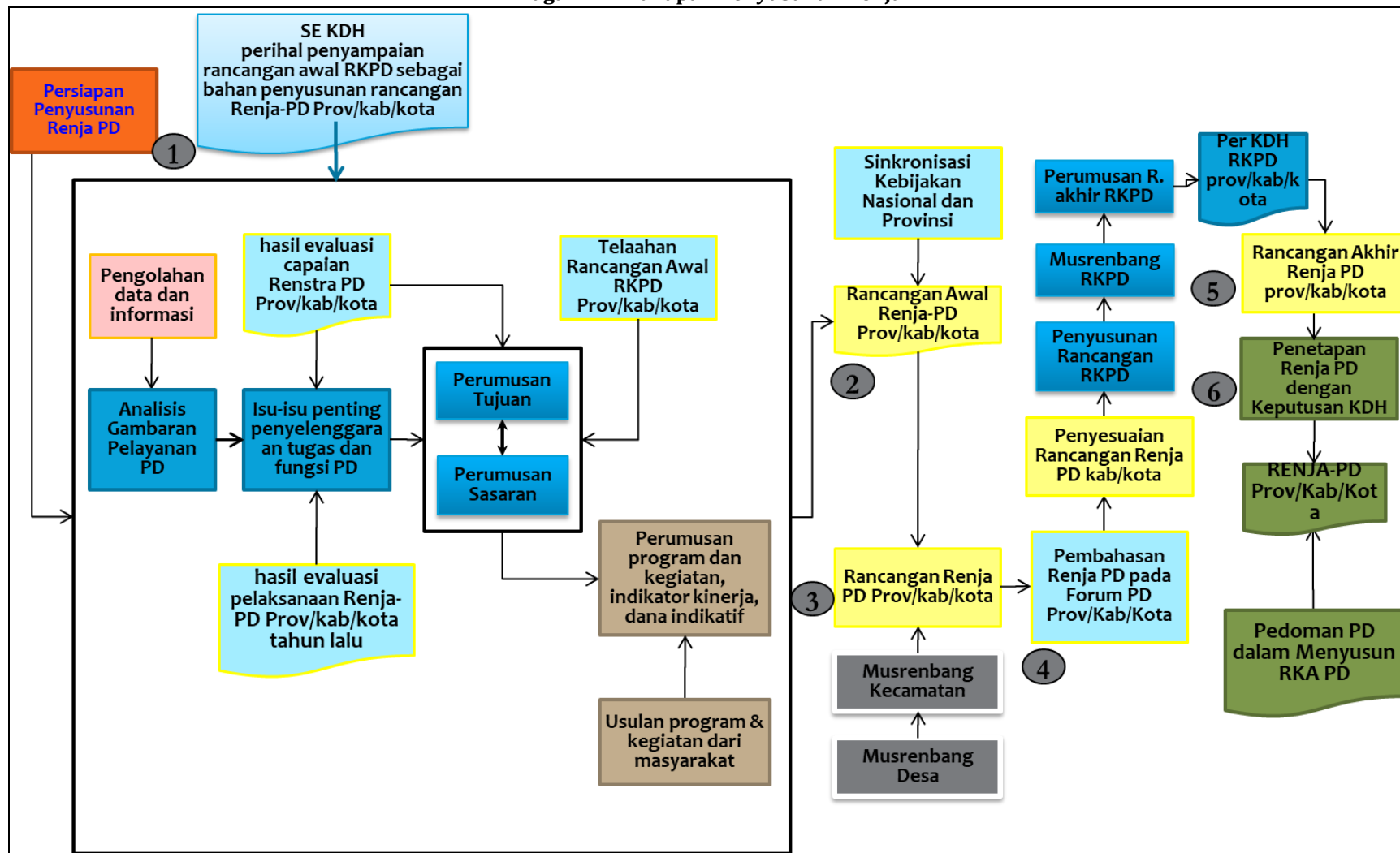
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 bahwa RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Kabupaten Sampang, Rancangan RKPD Kabupaten Sampang dan Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dijadikan pedoman oleh BPPKAD Kabupaten Sampang dalam menyusun Renja Tahun 2021. Rancangan RKPD Tahun 2021 diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana arah kebijakan pembangunan RKPD Kabupaten Sampang difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur, ketahanan sosial masyarakat, percepatan reformasi birokrasi dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Renja Perangkat Daerah meliputi Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu “ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat “ dan penjabaran dari tujuan BPPKAD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2014 – 2024 yaitu “ **Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien**”.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum BPPKAD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pendahuluan I - 8 | R K P D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 2 1 serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024.
30. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2019
31. Peraturan Bupati Sampang No 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPPKAD Tahun 2021 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Anggaran dan Kinerja BPPKAD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keegiatannya.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BPPKAD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam Penyusunan Renja Tahun 2021 ini proses selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang capaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Dengan adanya evaluasi ini dapat diketahui kemampuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam menjalankan program dan kegiatan. Disamping itu dapat diketahui kelemahan dan hambatan/kendala yang menyebabkan program kegiatan tidak dapat tercapai.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Sampang

## BPPKAD KABUPATEN SAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=10/4
04.02	Urusan Keuangan									
04.02.01	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
4.02.4.02.01.17	a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD	100%		100%	103,50%	103,50%	100%	101,75%	34%
		Kegiatan:								
4.02.4.02.01.17.01		1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3dokumen	6 dokumen	33%

4.02.4.02.01.17.02		2.Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak	84 Kecamatan		14 Kecamatan	14 Kecamatan	100%	14 Kecamatan	28 Kecamatan	33%
			Jumlah Wajib Pajak Terdata	8100 WP		1350 WP	1350 WP	100%	1350 WP	2700 WP	33%
			Jumlah Jenis Pajak	60 jenis		10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	20 jenis	33%
4.02.4.02.01.17.03		3.Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi	18 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	33%
4.02.4.02.01.17.04		4.Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	3900 skpd		650 skpd	650 skpd	100%	650 skpd	1300 skpd	33%
<b>4.02.4.02.01.18</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2</b>	<b>Persentase Penerimaan PBB-P2</b>	100%		100%	100%	100%	100%	100%	33%
		<b>Kegiatan:</b>									
4.02.4.02.01.18.01		Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2	2 Dokumen		2 Dokumen	0	0%		0	-
			Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2	4 kali		4 kali	0	0%		0	-

4.02.4.02.01.18.02		Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2	Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)	14 unit		14 unit	14 unit	100%		14 unit	100%
			Jumlah data objek pajak	31.386 unit		39.748 unit	48.719 unit	123%		48.719 unit	155%
4.02.4.02.01.18.03		Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2	Jumlah blangko SPPT	50 Dos		75 Dos	90 Dos	120%		90 Dos	180%
			Jumlah DHKP Untuk 186 desa	75 Dos		37 Dos	37 Dos	100%		37 Dos	49%
4.02.4.02.01.18.04		Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2	Jumlah Laporan Data Hutang PBB	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
			Jumlah Validasi Piutang PBB	2 kali		2 kali	2 kali	100%		2 kali	100%
			Persentase Penurunan Piutang PBB	1,50%		1,50%	1,15%	77%		1,15%	77%
4.02.4.02.01.16	b	<b>Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan</b>	<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>33%</b>
		<b>Kegiatan :</b>									
4.02.4.02.01.16.01		1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah	3 kali		2 kali	2 kali	100%	-	2 kali	67%

4.02.4.02.01.16.02		2.Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	Jumlah Validasi data harian penerimaan	47500 Transaksi		9500 Transaksi	9500 Transaksi	100%	9500 Transaksi	19000 transaksi	40%
			Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan	60 kali		12 kali	12 kali	100%	12 kali	24 kali	40%
			Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	40%
4.02.4.02.01.16.03		3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	55000 Transaksi		11.000 Transaksi	11.000 Transaksi	100%	11000 Transaksi	22.000 Transaksi	40%
			Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	60 kali		12 kali	12 kali	100%	12 kali	24 kali	40%
			Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun	10 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	40%
4.02.4.02.01.16.04		4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD tersusun dan LKD	18 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	28%

			Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD	6 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	33%
			Jumlah Audit LKD BPK RI	6 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	33%
4.02.4.02.01.16.05			5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengembangan /maintenance aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	100%	100%	100%	100%	90%	180%	33%
			Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	18 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	11%
			Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana	6 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	33%
4.02.4.02.01.19	c		<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
			<b>Kegiatan :</b>								
4.02.4.02.01.19.01			1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	25%

			Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	24 kali		1 kali	1 kali	100%	4 kali	5 kali	21%
4.02.4.02.01.19.02		2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	90 Bidang		15 Bidang	17 Bidang	113%	15 Bidang	32 Bidang	36%
			Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi	90 Bidang		15 Bidang	17 Bidang	113%	15 Bidang	32 Bidang	36%
			Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%
4.02.4.02.01.19.03		3.Pemanfaatan dan Pemindah Tangan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	252 OPD		42 OPD	42 opd	100%	42 OPD	42 opd	33%
			Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%



			Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD	252 OPD		42 OPD	42 opd	100%	42 OPD	42 opd	33%
4.02.4.02.01.19.04		4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
			Jumlah buku inventaris	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
			Jumlah laporan semesteran	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	33%
4.02.4.02.01.15		<b>Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
			<b>Persentase pentyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan :</b>									
4.02.4.02.01.15.01		Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dok KUA PPAS	4 dok		4 Dok	4 Dok	100%		4 Dok	100%
4.02.4.02.01.15.02		Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah	Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
			Jumlah sosialisasi tentang penatausahaan keu.daerah	4 kali		3 kali	2 kali	67%		2 kali	50%
4.02.4.02.01.15.04		Penyusunan APBD	Jumlah hari entri RKA-SKPD	15 hari		15 hari	15 hari	100%		15 hari	100%

			Jumlah pembahasan TAPD-DPRD	40 hari		40 hari	40 hari	100%		40 hari	100%
			Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD	260 buku		260 buku	260 buku	100%		260 buku	100%
			Jumlah hari entri anggaran kas	6 hari		6 hari	6 hari	100%		6 hari	100%
			Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%		2 dokumen	100%
4.02.4.02.01.15.05		Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah perda PAPBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%
			Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah	10 Hari		10 Hari	10 Hari	100%		10 Hari	100%
			Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD	10 Hari		10 Hari	10 Hari	100%		10 Hari	100%
			Jumlah Cetak raperda dan perda PAPBD	160 dokumen		160 dokumen	160 dokumen	100%		160 Buku	100%
4.02.4.02.01.15.07		Fasilitas pentausahaan belanja non gaji	Jumlah Penerbitan SP2D	13.000 dokumen		13.000 dokumen	13.144 dokumen	101%		13.144 dokumen	101 %

			Jumlah buku BKU, Pajak, Laporan Posisi Kas Harian dan register SP2D dalam 1 tahun	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	100%		48 Dokumen	100%
			Jumlah SPM yang diverifikasi	13.000 dokumen		13.000 dokumen	13.044 dokumen	100%		13.044 dokumen	100%
4.02.4.02.01.15.08		Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah Daftar Gaji PNS	588 dokumen		588 Dokumen	588 dokumen	100%		588 dokumen	100%
			Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP	616 dokumen		616 dokumen	616 dokumen	100%		616 dokumen	100%
			Jumlah Laporan Bulanan Gaji	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%		12 dokumen	100%
4.02.4.02.01.20	d	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA tepat waktu</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
		<b>Kegiatan :</b>									
4.02.4.02.01.20.01		1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Jumlah dok KUA PPAS	20 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	20%
			Jumlah pedoman penyusunan APBD	15 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	20%
4.02.4.02.01.20.02		3.Penyusunan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	10 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	20%

4.02.4.02.01.20.03		4.Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah perda dan perbup PAPBD	15 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	20%
4.02.4.02.01.21	e	<b>Program Penatausahaan Belanja Daerah</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>
4.02.4.02.01.21.01		1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah daftar gaji	3750 daftar gaji					750 daftar gaji	750 daftar gaji	20%
			jumlah Cetak SP2D Gaji	9350 SP2D					1870 SP2D	1870 SP2D	20%
			jumlah Kartu Kendali Gaji	15000 lbr					3000 lbr	3000 lbr	20%
			jumlah Register SPM Gaji	9350 SPM					1870 SPM	1870 SPM	20%
			jumlah Register SP2D Gaji	9350 SP2D					1870 SP2D	1870 SP2D	20%
			jumlah SKPP	1000 lbr					200 lbr	200 lbr	20%
			jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	672 lbr					134 lbr	134 lbr	20%
4.02.4.02.01.21.02		2. Fasilitasi penatausahaan belanja Kegiatan	Jumlah Penerbitan SP2D	65000 lbr					13000 lbr	13000 lbr	20%

			jumlah Buku Kas Umum (BKU)	240 buku					48 buku	48 buku	20%
			jumlah posisi kas harian	240 buku					48 buku	48 buku	20%
			jumlah buku pajak	5 buku					1 buku	1 buku	20%
			jumlah register SPM	20 buku					4 buku	4 buku	20%
			jumlah register SP2D	20 buku					4 buku	4 buku	20%
			jumlah penerbitan SPD	900 dokumen					180 dokumen	180 dokumen	20%
			jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana	5 kali					1 kali	1 kali	20%
			jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	5 kali					1 kali	1 kali	20%
			jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik	20 kali					4 kali	4 kali	20%
4.02.4.02.01.21.03		3. Fasilitasi penatausahaan belanja PPKD	jumlah penerbitan SPP	7500 lbr			-	-	1500 lbr	1500 lbr	20%
			jumlah penerbitan SPM	7500 lbr			-	-	1500 lbr	1500 lbr	20%
			jumlah Buku Kas Umum	60 buku			-	-	12 buku	12 buku	20%

			jumlah register SPM	10 buku			-	-	2 buku	2 buku	20%
			jumlah register SP2D	10 buku			-	-	2 buku	2 buku	20%
			jumlah laporan realisasi ADD dan DD	20 buku			-	-	4 buku	4 buku	20%
			jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	15 kali			-	-	3 kali	3 kali	20%
<b>4.02.4.02.01.01</b>	<b>f</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN JASA PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
4.02.4.02.01.01.01		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	12490 surat		1500 surat	1161 surat	77%	1500 surat	2661 surat	21%

			Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet	24 rekening		4 rekening	4 rekening	100%	4 rekening	8 rekening	33%
			Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2	288 unit		48 unit	48 unit	100%	56 unit	104 unit	36%
			Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	5, 2, 2 kendaraan, gedung, genset		5, 2, 2 kendaraan, gedung, genset	5, 2, 2 kendaraan, gedung, genset	100%	5, 2, 2 kendaraan, gedung, genset	5, 2, 2 kendaraan, gedung, genset	17%
			- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Service,	12 gedung		2 gedung	2 gedung	100%	2 gedung	4 gedung	33%
			Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	936 orang bulan		156 orang bulan	156 orang bulan	100%	156 orang bulan	312 orang	33%
			Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun	5475 exemplar					1095 exemplar	1095 exemplar	20%

			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	6250 orang					1250 orang	1250 orang	20%
			Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	1564 orang					300 org	300 org	19%
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	36 jenis		36 jenis	36 jenis	100%	-	36 jenis	100%
4.02.4.02.01.01.02		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan atk	438 jenis		71 jenis	71 jenis	100%	72 jenis	143 jenis	33%
			jumlah kebutuhan barang cetakan	90 jenis		15 jenis	15 jenis	100%	17 jenis	32 jenis	36%
			Jumlah penggandaan	1050000 lbr		175.000 lbr	56.000 lbr	32%	140.000 lbr	196000 lbr	19%
			Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun	-		3 unit	3 unit	100%	-	3 unit	100%
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1250 org		1250 org	975 orang	96%	-	975 orang	78%



			Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	300 org		300 org	213 orang	71%	-	213 orang	71%
			Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai	167 jenis		25 jenis	25 jenis	100%	27 jenis	52 jenis	31%
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	180 jenis		-	-	-	26 jenis	26 jenis	14%
4.02.4.02.01.01.03		Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	141 kali		23 kali	9 kali	39%	19 kali	28 kali	20%
			Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun	703 kali		115 kali	140 kali	122%	103 kali	243 kali	35%
4.02.4.02.01.02	g	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150%</b>	<b>33%</b>

4.02.4.02.01.02.01		Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terpelihara	36 unit		6 unit	6 unit	100%	6 unit	12 unit	33%
4.02.4.02.01.02.02		Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	24 unit		5 unit	5 unit	100%	4 unit	9 unit	37%
4.02.4.02.01.02.03		Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	42 unit		7 unit	7 unit	100%	8 unit	15 unit	36%
4.02.4.02.01.02.04		Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1799 unit		294 unit	294 unit	100%	290 unit	584 unit	32%
4.02.4.02.01.03	h	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>152%</b>	<b>152%</b>	<b>100%</b>	<b>126%</b>	<b>25%</b>
4.02.4.02.01.03.01		Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	73 kali		11 kali	20 kali	182%	16 kali	36 kali	49%

4.02.4.02.01.04		i	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN, DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
4.02.4.02.01.04.01			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	24 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	33%	
				Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	33%	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	33%	
4.02.4.02.01.04.02			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	18 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 dokumen	33%	
4.02.4.02.01.04.03			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	12 dokumen		2 kali	2 kali	100%	2 kali	4 kali	33%	



Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, sebagaimana sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi BUMD
2. Masih rendahnya PAD (meskipun target tercapai)
3. Masih tingginya deviasi penyerapan keuangan
4. Data BMD perlu terus di *update*

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKAD**

Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang TA. 2021, merupakan turunan dari RKPD TA. 2021 Kabupaten Sampang yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah, dari visi tersebut dijabarkan dalam misi Bupati Sampang yang diadopsi oleh Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya BPPKAD melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu dalam hal pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan harus diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna mengamankan baik sisi penerimaan maupun pengeluaran anggaran daerah. Perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai menunjukkan hasil yang akan menjadi pondasi bagi penyempurna kedepan. Capaian kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah setiap tahun selama tiga tahun terakhir diatas target tahunan. Demikian pula halnya dengan upaya-upaya perbaikan akuntansi aset milik Pemda dan kepemilikan bukti formal berupa sertifikat tanah. Meraih opini WTP menjadi salah satu prioritas Kabupaten Sampang, tentu saja dengan dukungan dan komitmen seluruh OPD dan seluruh masyarakat Kabupaten Sampang.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang**

No	Indikator	SP M	IK K	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	Tahun 2019 (Thn n-2)	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan			Des 2018 / Okt 2019	Des 2019/ Okt 2020	Des 2020/ Okt 2021	Des 2021/ Okt 2022	Des 2018 / Sept 2019	Des 2019 / -	Des 2020/ Okt 2021	Des 2021/ Okt 2022	
2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target			7,00%	6,50%	6,00%	5,50%	8,45%	-	6,00%	5,50%	
3	Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD			Juli 2019	Juli 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Jul-19		Agustus 2021	Agustus 2022	
4	Persentase Data BMD yang Valid			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
5	Jumlah PAD			162.994.854.462	166.346.873.852	228.283.557.603	246.978.131.550	168.778.008.507	115.734.373.048,88	228.283.557.603	246.978.131.550	

## 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

### I. Tugas Pokok dan Fungsi

BPPKAD Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### II. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa kendala yang dihadapi BPPKAD Kabupaten Sampang berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian Tugas Pokok dan fungsi dari BPPKAD Kabupaten Sampang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Konsolidasi dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pengelolaan Pendapatan belum optimal
2. Keterbatasan SDM pada BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Keterbatasan SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait Administrasi Pengelolaan Anggaran dan penatausahaan keuangan

4. Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan WP/WR
5. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang masih terbatas

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai SKPD penunjang dalam urusan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu adanya rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hal tersebut, maka BPPKAD Kabupaten Sampang melakukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pemuktahiran Basis data Pajak Daerah.
  - b. Penyisiran dan penagihan pajak
  - c. Modernisasi Teknologi Informasi Pajak Daerah
  - d. Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi terkait tata kelola pemungutan dan pemanfaatan teknologi
  - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan ( Penagih, Pemeriksa, penilai pajak dan juru sita pajak, dll )
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah
  - a. Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD evaluasi dan rekonsiliasi berkala secara triwulanan untuk memantau penatausahaan keuangan Perangkat Daerah
  - b. Pelatihan dan sosialisasi terkait perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan
  - c. Peningkatan SDM Penyusunan Program/Kegiatan, PPK dan Bendahara
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi keuangan daerah
  - a. Pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
  - b. Peningkatan koordinasi dan pengendalian dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan/perubahan regulasi sesuai ketentuan Perundang-undangan
4. Meningkatkan ketertiban pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)
  - a. Pengamanan secara administratif dan hukum terhadap barang milik daerah (BMD)
  - b. Diklat/pelatihan pengurus barang dan pembantu pengurus barang



c. Identifikasi dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKAD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

#### **2. 4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil BPPKAD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi BPPKAD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

## BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SAMPANG

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
a.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1	Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD	100	%	4.226.495.220,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1	Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD	100	%	3.050.000.000,00
	<b>Kegiatan:</b>						<b>Kegiatan:</b>							
	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sampang	1	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	3	Dokumen	276.415.000	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sampang	1	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	3	Dokumen	250.000.000
	2.Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	Sampang	1	Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak	14	Kecamatan	1.893.910.000	2.Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	Sampang	1	Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak	14	Kecamatan	1.450.000.000
			2	Jumlah Wajib Pajak Terdata	1350	WP				2	Jumlah Wajib Pajak Terdata	1350	WP	
			3	Jumlah Jenis Pajak	10	jenis				3	Jumlah Jenis Pajak	10	jenis	
	3.Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Sampang	1	Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi	3	dokumen	624.000.000	3.Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Sampang	1	Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi	3	dokumen	400.000.000

	4.Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	Sampang	1	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	650	SKPD	1.432.170.220	4.Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	Sampang	1	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	650	SKPD	950.000.000	
<b>b</b>	<b>Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan</b>			<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>653.628.000,00</b>	<b>Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan</b>			<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>563.000.000,00</b>	
	<b>Kegiatan :</b>							<b>Kegiatan :</b>							
	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	Sampang	1	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah		kali	87520000	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	Sampang	1	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah		kali	-	
	2.Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	Sampang	1	Jumlah Validasi data harian penerimaan	9500	Transaksi	40.123.000,00	2.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Sampang	1	Jumlah Validasi data harian penerimaan	9500	Transaksi	42.000.000,00	
			2	Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan	12	kali				2	Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan	12	kali		
			3	Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen				3	Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen		
	3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Sampang	1	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	11000	Transaksi	48.982.000,00	3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Sampang	1	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	11000	Transaksi	57.000.000,00	
			2	Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	12	kali				2	Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	12	kali		

			3	Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen				3	Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen		
	4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	Sampang	1	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD	3	dokumen	164.743.000,00	4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	Sampang	1	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD	3	dokumen	164.000.000,00	
			2	Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD	1	kegiatan				2	Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD	1	kegiatan		
			3	Jumlah Audit LKD BPK RI	1	kali				3	Jumlah Audit LKD BPK RI	1	kali		
	5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sampang	1	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	90	%	312.260.000,00	5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sampang	1	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	90	%	300.000.000,00	
			2	Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	3	kali				2	Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	3	kali		
			3	Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembangan Aplikasi	1	paket				3	Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembangan Aplikasi	1	paket		
c	Program Pengelolaan Aset Daerah			Persentase Laporan BMD yang tepat waktu	100	%	810.902.925,00	Program Pengelolaan Aset Daerah			Persentase Laporan BMD yang tepat waktu	100	%	735.000.000,00	
	Kegiatan :							Kegiatan :							

	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	90.462.873	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	90.000.000
			2	Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	kali				2	Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	kali	
	2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	15	Bidang	405.440.052	2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	15	Bidang	350.000.000
			2	Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi	15	Bidang				2	Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi	15	Bidang	
			3	Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	2	Dokumen				3	Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	2	Dokumen	
	3.Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	42	OPD	220.000.000	3.Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	42	OPD	200.000.000
			2	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun	2	Dokumen				2	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun	2	Dokumen	
			3	Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD	42	OPD				3	Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD	42	OPD	

	4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	1	Dokumen	95.000.000	4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Sampang	1	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	1	Dokumen	95.000.000
			2	Jumlah buku inventaris	1	Dokumen				2	Jumlah buku inventaris	1	Dokumen	
			3	Jumlah laporan semesteran	2	Laporan				3	Jumlah laporan semesteran	2	Laporan	
<b>d</b>	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA / DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.098.741.500,00</b>	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA / DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.130.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan :</b>							<b>Kegiatan :</b>						
	1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Sampang	1	Jumlah dok KUA PPAS	4	dokumen	312.745.500,00	1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Sampang	1	Jumlah dok KUA PPAS	4	dokumen	330.000.000,00
			2	Jumlah pedoman penyusunan APBD	3	dokumen				2	Jumlah pedoman penyusunan APBD	3	dokumen	
	2. Penyusunan APBD	Sampang	1	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	2	dokumen	451.000.500,00	3.Penyusunan APBD	Sampang	1	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	2	dokumen	600.000.000,00
	3, Fasilitasi Pengendalian Anggaran	Sampang	1	Persentase kegiatan yang direvisi setelah penetapan APBD	7	%	334.995.500,00	4.Penyusunan Perubahan APBD	Sampang	1	Persentase kegiatan yang direvisi setelah penetapan APBD	7	%	200.000.000,00

e	Program Penatausahaan Belanja Daerah		1	Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas	100	%	330.000.000,00	Program Penatausahaan Belanja Daerah		1	Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas	100	%	430.000.000,00
	1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Sampang	1	Jumlah daftar gaji	750	Dok	106.448.500,00	1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Sampang	1	Jumlah daftar gaji	750	Dok	140.000.000,00
			2	jumlah Cetak SP2D Gaji	1870	Dok				2	jumlah Cetak SP2D Gaji	1870	Dok	
			3	jumlah Kartu Kendali Gaji	3000	Dok				3	jumlah Kartu Kendali Gaji	3000	Dok	
			4	jumlah Register SPM Gaji	1870	Dok				4	jumlah Register SPM Gaji	1870	Dok	
			5	jumlah Register SP2D Gaji	1870	Dok				5	jumlah Register SP2D Gaji	1870	Dok	
			6	jumlah SKPP	200	Dok				6	jumlah SKPP	200	Dok	
			7	jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	112	Dok				7	jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	112	Dok	
	2. Fasilitasi penatausahaan belanja Kegiatan	Sampang	1	Jumlah Penerbitan SP2D	13000	lbr	134.818.500,00	2. Fasilitasi penatausahaan belanja Kegiatan	Sampang	1	Jumlah Penerbitan SP2D	13000	lbr	200.000.000,00
			2	jumlah Buku Kas Umum (BKU)	48	buku				2	jumlah Buku Kas Umum (BKU)	48	buku	
			3	jumlah posisi kas harian	48	buku				3	jumlah posisi kas harian	48	buku	
			4	jumlah buku pajak	1	buku				4	jumlah buku pajak	1	buku	
			5	jumlah register SPM	13000	SPM				5	jumlah register SPM	13000	SPM	
			6	jumlah register SP2D	13000	SP2D				6	jumlah register SP2D	13000	SP2D	
			7	jumlah penerbitan SPD	180	dokumen				7	jumlah penerbitan SPD	180	dokumen	
			8	jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana	1	kali				8	jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana	1	kali	

			9	jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik	4	kali			9	jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik	4	kali			
	3. Fasilitas penatausahaan belanja PPKD	Sampang	1	jumlah penerbitan SPP	1500	lbr	88.733.000,00	3. Fasilitas penatausahaan belanja PPKD	Sampang	1	jumlah penerbitan SPP	1500	lbr	90.000.000,00	
			2	jumlah penerbitan SPM	1500	lbr				2	jumlah penerbitan SPM	1500	lbr		
			3	jumlah Buku Kas Umum	12	buku				3	jumlah Buku Kas Umum	12	buku		
			4	jumlah register SPM	2	buku				4	jumlah register SPM	2	buku		
			5	jumlah register SP2D	2	buku				5	jumlah register SP2D	2	buku		
			6	jumlah laporan realisasi ADD dan DD	4	dokumen				6	jumlah laporan realisasi ADD dan DD	4	dokumen		
			7	jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	3	kali				7	jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	3	kali		
f	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>			<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>		<b>1.786.600.000,00</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>			<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>		<b>1.910.000.000,00</b>	
	<b>DAN JASA PERKANTORAN</b>							<b>DAN JASA PERKANTORAN</b>							
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Sampang	1	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	2060	surat	1.187.100.000,00	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Sampang	1	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	2060	surat	1.325.000.000,00	
			2	Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet	12	bulan				2	Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet	12	bulan		



			3	Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2	48	unit				3	Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2	48	unit		
			4	Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	9	unit				4	Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	9	unit		
			5	Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise	2	gedung				5	- Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise,	2	gedung		
			6	Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	156	orang bulan				6	Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	156	orang bulan		
			7	Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun	1095	exemplar				7	Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun	1095	exemplar		
			8	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1250	orang				8	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1250	orang		
			9	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	309	orang				9	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	309	orang		
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Sampang		1	Jumlah kebutuhan atk	75	jenis	304.500.000,00	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Sampang	1	Jumlah kebutuhan atk	75	jenis	290.000.000,00	

			2	jumlah kebutuhan barang cetakan	15	jenis				2	jumlah kebutuhan barang cetakan	15	jenis		
			3	Jumlah penggandaan	175000	lbr				3	Jumlah penggandaan	175000	lbr		
			4	Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai	27	jenis				4	Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai	27	jenis		
			5	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	36	jenis				5	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	36	jenis		
			6	Jumlah Arsip yang tertata	250	Meter lari				6	Jumlah Arsip yang tertata	250	Meter lari		
	Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Sampang	1	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	23	kali	295.000.000,00	Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Sampang	1	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	23	kali	295.000.000,00	
			2	Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun	117	kali				2	Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun	117	kali		
<b>g</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.485.886.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.292.000.000,00</b>	
	<b>DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>DAN PRASARANA APARATUR</b>							

	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	Sampang	1	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terehabilitasi	6	unit	492.000.000,00	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	Sampang	1	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terehabilitasi	6	unit	492.000.000,00	
	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	Sampang	1	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	4	unit	159.700.000,00	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	Sampang	1	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	4	unit	150.000.000,00	
	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Sampang	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	7	unit	193.200.000,00	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Sampang	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	7	unit	150.000.000,00	
	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Sampang	1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	298	unit	640.986.000,00	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Sampang	1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	298	unit	500.000.000,00	
<b>h</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>			<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>			<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>				
	<b>SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>100</b>		<b>120.500.000,00</b>	<b>SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>100</b>			<b>80.000.000,00</b>
	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Sampang	1	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	12	kali	120.500.000,00	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Sampang	1	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	12	kali	80.000.000,00	
<b>i</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM</b>			<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM</b>			<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>				
	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN,</b>				<b>100</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN,</b>				<b>100</b>			<b>45.000.000,00</b>
	<b>DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>							<b>DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>							

	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Sampang	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	4	dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Sampang	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	4	dokumen	15.000.000,00
			2	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	dokumen				2	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	dokumen	
			3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dokumen				3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sampang	1	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	3	dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sampang	1	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	3	dokumen	15.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Sampang	1	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2	kali	15.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Sampang	1	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2	kali	15.000.000,00

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2021 Kabupaten Sampang**

Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan BPPKAD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2021 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019- 2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang **(RKPD) Tahun 2021** dengan Tema “ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat ”.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata	<b>Prioritas 1:</b> Pemulihan ekonomi melalui penguatan sector unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang ber kelanjutan

3	SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelligence	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan ketahanan social masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan kepedulian social dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	<b>Prioritas 4:</b> Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	
7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah serta membantu Bupati Sampang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dituntut untuk menjadi ujung tombak dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
1	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	11,37
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	228.283.557.603
2	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP
	<b>Sasaran:</b>		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	a Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2020 dan Okt 2021
		b Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00
		c Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Agustus 2021
		d Persentase Data BMD yang Valid	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2021

Dalam merumuskan program kegiatan BPPKAD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, BPPKAD mendukung Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten yaitu **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan arabisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan



kegiatan Perangkat Daerah.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan
- Program Pengelolaan Aset Daerah
- Program Pengelolaan Anggaran Daerah
- Program Penatausahaan Belanja Daerah

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan BPPKAD Tahun 2021 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kabupaten Sampang**

**BPPKAD Kabupaten Sampang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5		6	8	10		11	
04.02	Urusan Keuangan										
4.02.4.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD	100	%	3.787.495.000,00	DAU	100	%	3.976.869.750,00	
	<b>Kegiatan:</b>										
4.02.4.02.01.17.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	Sampang	3	Dokumen	276.415.000	Sampang	3	Dokumen	290.235.750
4.02.4.02.01.17.02	2.Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	1	Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak	Sampang	14	Kecamatan	1.693.910.000	Sampang	14	Kecamatan	1.778.605.500

		2	Jumlah Wajib Pajak Terdata		1350	WP			1350	WP		
		3	Jumlah Jenis Pajak		10	jenis			10	jenis		
4.02.4.02.01.17.03	3.Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1	Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi	Sampang	3	dokumen	624.000.000		Sampang	3	dokumen	655.200.000
4.02.4.02.01.17.04	4.Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	1	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	Sampang	650	SKPD	1.193.170.000		Sampang	650	SKPD	1.252.828.500
<b>4.02.4.02.01.17</b>	<b>Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan</b>		<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>727.281.872,00</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>763.645.965,60</b>
	<b>Kegiatan :</b>											
4.02.4.02.01.17.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	1	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah	Sampang		kali	-		Sampang		kali	
4.02.4.02.01.17.02	2.Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	1	Jumlah Validasi data harian penerimaan	Sampang	9500	Transaksi	42.323.472,00		Sampang	9500	Transaksi	44.439.645,60
		2	Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan		12	kali				12	kali	

		3	Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun		2	dokumen				2	dokumen	0
4.02.4.02.01.17.03	3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	1	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	Sampang	11000	Transaksi	57.225.000,00		Sampang	11000	Transaksi	60.086.250,00
		2	Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran		12	kali				12	kali	
		3	Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun		2	dokumen				2	dokumen	
4.02.4.02.01.17.04	4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	1	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD	Sampang	3	dokumen	164.743.000,00		Sampang	3	dokumen	172.980.150,00
		2	Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD		1	kegiatan				1	kegiatan	
		3	Jumlah Audit LKD BPK RI		1	kali				1	kali	
4.02.4.02.01.17.05	5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	Sampang	90	%	462.990.400,00		Sampang	90	%	486.139.920,00

		2	Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD		3	kali				3	kali	
		3	Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembangan Aplikasi		1	paket				1	paket	
<b>4.02.4.02.01.19</b>	<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>Persentase Laporan BMD yang tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>811.462.873,00</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>852.036.016,65</b>
	<b>Kegiatan :</b>											
4.02.4.02.01.19.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sampang	2	Dokumen	90.462.873		Sampang	2	Dokumen	94.986.017
		2	Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		4	kali				4	kali	
4.02.4.02.01.19.02	2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	Sampang	15	Bidang	406.000.000		Sampang	15	Bidang	426.300.000

		2	Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi		15	Bidang				15	Bidang	
		3	Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun		2	Dokumen				2	Dokumen	
4.02.4.02.01.19.03	3.Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	1	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	Sampang	42	OPD	220.000.000		Sampang	42	OPD	231.000.000
		2	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun		2	Dokumen				2	Dokumen	
		3	Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD		42	OPD				42	OPD	
4.02.4.02.01.19.04	4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	1	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	Sampang	1	Dokumen	95.000.000		Sampang	1	Dokumen	99.750.000
		2	Jumlah buku inventaris		1	Dokumen				1	Dokumen	
		3	Jumlah laporan semesteran		2	Laporan				2	Laporan	

4.02.4.02.01.20	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	1	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA / DPA Perubahan tepat waktu</b>		100	%	1.154.950.500,00			100	%	1.212.698.025,00
	<b>Kegiatan :</b>											
4.02.4.02.01.20.01	1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	1	Jumlah dok KUA PPAS	Sampang	4	dokumen	337.850.000,00		Sampang	4	dokumen	354.742.500,00
		2	Jumlah pedoman penyusunan APBD		3	dokumen				3	dokumen	
4.02.4.02.01.20.02	2. Penyusunan APBD	1	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	Sampang	2	dokumen	476.105.000,00		Sampang	2	dokumen	499.910.250,00
4.02.4.02.01.20.03	3, Fasilitasi Pengendalian Anggaran	1	Persentase kegiatan yang direvisi setelah penetapan APBD	Sampang	7	%	340.995.500,00		Sampang	7	%	358.045.275,00
4.02.4.02.01.21	<b>Program Penatausahaan Belanja Daerah</b>	1	<b>Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas</b>		100	%	377.508.900,00			100	%	396.384.345,00
4.02.4.02.01.21.01	1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	1	Jumlah daftar gaji	Sampang	750	lbr	104.147.900,00		Sampang	750	lbr	109.355.295,00
		2	jumlah Cetak SP2D Gaji		1870	lbr				1870	lbr	
		3	jumlah Kartu Kendali Gaji		3000	lbr				3000	lbr	

		4	jumlah Register SPM Gaji		1870	lbr				1870	lbr	
		5	jumlah Register SP2D Gaji		1870	lbr				1870	lbr	
		6	jumlah SKPP		200	lbr				200	lbr	
		7	jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan		112	lbr				112	lbr	
4.02.4.02.01.21.02	2. Fasilitas penatausahaan belanja Kegiatan	1	Jumlah Penerbitan SP2D	Sampang	13000	lbr	181.967.000,00		Sampang	13000	lbr	191.065.350,00
		2	jumlah Buku Kas Umum (BKU)		48	buku				48	buku	
		3	jumlah posisi kas harian		48	buku				48	buku	
		4	jumlah buku pajak		1	buku				1	buku	
		5	jumlah register SPM		4	buku				4	buku	
		6	jumlah register SP2D		4	buku				4	buku	
		7	jumlah penerbitan SPD		180	dokumen				180	dokumen	
		8	jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana		1	kali				1	kali	
		9	jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik		4	kali				4	kali	
4.02.4.02.01.21.03	3. Fasilitas penatausahaan belanja PPKD	1	jumlah penerbitan SPP	Sampang	1500	lbr	91.394.000,00		Sampang	1500	lbr	95.963.700,00
		2	jumlah penerbitan SPM		1500	lbr				1500	lbr	



		3	jumlah Buku Kas Umum		12	buku				12	buku	
		4	jumlah register SPM		2	buku				2	buku	
		5	jumlah register SP2D		2	buku				2	buku	
		6	jumlah laporan realisasi ADD dan DD		4	dokumen				4	dokumen	
		7	jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah		3	kali				3	kali	
<b>4.02.4.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>100</b>		<b>1.786.600.000,00</b>			<b>100</b>		<b>1.875.930.000,00</b>
	<b>DAN JASA PERKANTORAN</b>											
4.02.4.02.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Sampang	2060	surat	1.187.100.000,00		Sampang	2060	surat	1.246.455.000,00
		2	Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet		12	bulan				12	bulan	

		3	Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2		48	unit				48	unit	
		4	Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset		9	unit				9	unit	
		5	Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise		2	gedung				2	gedung	
		6	Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam		156	orang bulan				156	orang bulan	
		7	Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun		1095	exemplar				1095	exemplar	
		8	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia		1250	orang				1250	orang	
		9	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia		309	orang				309	orang	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah kebutuhan atk	Sampang	75	jenis	304.500.000,00		Sampang	75	jenis	319.725.000,00

		2	jumlah kebutuhan barang cetakan		15	jenis				15	jenis	
		3	Jumlah penggandaan		175000	lbr				175000	lbr	
		4	Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai		27	jenis				27	jenis	
		5	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih		36	jenis				36	jenis	
		6	Jumlah Arsip yang tertata		250	Meter lari				250	Meter lari	
4.02.4.02.01.01.03	Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	Sampang	23	kali	295.000.000,00		Sampang	23	kali	309.750.000,00
		2	Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun		117	kali				117	kali	
4.02.4.02.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.485.886.000,00</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.560.180.300,00</b>

	<b>DAN PRASARANA APARATUR</b>											
4.02.4.02.01.02.01	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terehabilitasi	Sampang	6	unit	492.000.000,00		Sampang	6	unit	516.600.000,00
4.02.4.02.01.02.02	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	Sampang	4	unit	159.700.000,00		Sampang	4	unit	167.685.000,00
4.02.4.02.01.02.03	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	Sampang	7	unit	193.200.000,00		Sampang	7	unit	202.860.000,00
4.02.4.02.01.02.04	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Sampang	298	unit	640.986.000,00		Sampang	298	unit	673.035.300,00
<b>4.02.4.02.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>									
	<b>SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>100</b>		<b>120.500.000,00</b>			<b>100</b>		<b>126.525.000,00</b>
4.02.4.02.01.03.01	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	1	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	Sampang	12	kali	120.500.000,00		Sampang	12	kali	126.525.000,00

4.02.4.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik									
	PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN,				100		45.000.000,00			100		47.250.000,00
	DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK											
4.02.4.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	Sampang	4	dokumen	15.000.000,00		Sampang	4	dokumen	15.750.000,00
		2	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		2	dokumen				2	dokumen	
		3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	dokumen				1	dokumen	
4.02.4.02.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	Sampang	3	dokumen	15.000.000,00		Sampang	3	dokumen	15.750.000,00
4.02.4.02.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	Sampang	2	kali	15.000.000,00		Sampang	2	kali	15.750.000,00





**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD**

BPPKAD mengampu urusan Unsur Penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan. Program-program BPPKAD pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah “ Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan arabisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ” dan **Misi 4** adalah “ Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2021**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		target capaian		Pagu Indikatif
1	2	4		5		6
	<b>Pendapatan</b>					<b>74.187.815.000</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					<b>23.977.431.016</b>
	<b>Belanja Langsung</b>					<b>10.296.685.145</b>
<b>04.02</b>	<b>Urusan Keuangan</b>					
<b>4.02.4.02.01.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.787.495.000,00</b>
	<b>Kegiatan:</b>					
4.02.4.02.01.17.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	3	Dokumen	276.415.000
4.02.4.02.01.17.02	2.Pendaftaran, Pendataan, Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	1	Jumlah wilayah Pendataan dan Penagihan Pajak	14	Kecamatan	1.693.910.000
		2	Jumlah Wajib Pajak Terdata	1350	WP	
		3	Jumlah Jenis Pajak	10	jenis	
4.02.4.02.01.17.03	3.Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1	Jumlah Laporan PAD, DBH Pusat, DBH Propinsi	3	dokumen	624.000.000
4.02.4.02.01.17.04	4.Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	1	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	650	SKPD	1.193.170.000



<b>4.02.4.02.01.17</b>	<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan</b>		<b>Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>727.281.872,00</b>
	<b>Kegiatan :</b>					
4.02.4.02.01.17.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	1	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah		kali	-
4.02.4.02.01.17.02	2.Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	1	Jumlah Validasi data harian penerimaan	9500	Transaksi	42.323.472,00
		2	Jumlah Rekonsiliasi data penerimaan	12	kali	
		3	Jumlah Laporan Penerimaan Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen	
4.02.4.02.01.17.03	3.Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	1	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	11000	Transaksi	57.225.000,00
		2	Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	12	kali	
		3	Jumlah Laporan Pengeluaran Semesteran dan Akhir Tahun	2	dokumen	
4.02.4.02.01.17.04	4.penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	1	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD serta LKD	3	dokumen	164.743.000,00
		2	Jumlah asistensi dan entry bersama LK SKPD	1	kegiatan	
		3	Jumlah Audit LKD BPK RI	1	kali	
4.02.4.02.01.17.05	5.Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan e-PAD	90	%	462.990.400,00
		2	Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	3	kali	
		3	Jumlah Pengadaan Sarana Parasarana Pengembangan Aplikasi	1	paket	
<b>4.02.4.02.01.19</b>	<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>Persentase Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>811.462.873,00</b>
	<b>Kegiatan :</b>					
4.02.4.02.01.19.01	1.Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	90.462.873

		2	Jumlah sosialisasi tentang regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	kali	
4.02.4.02.01.19.02	2. Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	15	Bidang	406.000.000
		2	Jumlah BMD yang dapat diamankan secara fisik dan administrasi	15	Bidang	
		3	Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	2	Dokumen	
4.02.4.02.01.19.03	3.Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	1	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	42	OPD	220.000.000
		2	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan BMD yang tersusun	2	Dokumen	
		3	Jumlah Dokumen Pemindah tanganan BMD	42	OPD	
4.02.4.02.01.19.04	4. Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	1	Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	1	Dokumen	95.000.000
		2	Jumlah buku inventaris	1	Dokumen	
		3	Jumlah laporan semesteran	2	Laporan	
<b>4.02.4.02.01.20</b>	<b>Program Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA / DPA Perubahan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.154.950.500,00</b>
	<b>Kegiatan :</b>					
4.02.4.02.01.20.01	1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	1	Jumlah dok KUA PPAS	4	dokumen	337.850.000,00
		2	Jumlah pedoman penyusunan APBD	3	dokumen	
4.02.4.02.01.20.02	2. Penyusunan APBD	1	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	2	dokumen	476.105.000,00
4.02.4.02.01.20.03	3, Fasilitasi Pengendalian Anggaran	1	Persentase kegiatan yang direvisi setelah penetapan APBD	7	%	340.995.500,00
<b>4.02.4.02.01.21</b>	<b>Program Penatausahaan Belanja Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>377.508.900,00</b>
4.02.4.02.01.21.01	1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	1	Jumlah daftar gaji	750	lbr	104.147.900,00
		2	jumlah Cetak SP2D Gaji	1870	lbr	
		3	jumlah Kartu Kendali Gaji	3000	lbr	

		4	jumlah Register SPM Gaji	1870	lbr	
		5	jumlah Register SP2D Gaji	1870	lbr	
		6	jumlah SKPP	200	lbr	
		7	jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	112	lbr	
4.02.4.02.01.21.02	2. Fasilitas penatausahaan belanja Kegiatan	1	Jumlah Penerbitan SP2D	13000	lbr	181.967.000,00
		2	jumlah Buku Kas Umum (BKU)	48	buku	
		3	jumlah posisi kas harian	48	buku	
		4	jumlah buku pajak	1	buku	
		5	jumlah register SPM	4	buku	
		6	jumlah register SP2D	4	buku	
		7	jumlah penerbitan SPD	180	dokumen	
		8	jumlah kegiatan peluncuran UP terlaksana	1	kali	
		9	jumlah terlaksananya rekon DAK Fisik	4	kali	
4.02.4.02.01.21.03	3. Fasilitas penatausahaan belanja PPKD	1	jumlah penerbitan SPP	1500	lbr	91.394.000,00
		2	jumlah penerbitan SPM	1500	lbr	
		3	jumlah Buku Kas Umum	12	buku	
		4	jumlah register SPM	2	buku	
		5	jumlah register SP2D	2	buku	
		6	jumlah laporan realisasi ADD dan DD	4	dokumen	
		7	jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	3	kali	
<b>4.02.4.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>		<b>1.786.600.000,00</b>
	<b>DAN JASA PERKANTORAN</b>					
4.02.4.02.01.01.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	2060	surat	1.187.100.000,00
		2	Jumlah jasa pemakaian telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dan sewa internet	12	bulan	

		3	Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2	48	unit	
		4	Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	9	unit	
		5	Jumlah pemeliharaan Jasa Cleaning Servise	2	gedung	
		6	Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	156	orang bulan	
		7	Pembayaran langganan surat kabar selama 1 tahun	1095	exemplar	
		8	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1250	orang	
		9	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	309	orang	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah kebutuhan atk	75	jenis	304.500.000,00
		2	jumlah kebutuhan barang cetakan	15	jenis	
		3	Jumlah penggandaan	175000	lbr	
		4	Jumlah konponen sumber daya listrik kantor layak pakai	27	jenis	
		5	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	36	jenis	
		6	Jumlah Arsip yang tertata	250	Meter lari	
4.02.4.02.01.01.03	Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	23	kali	295.000.000,00
		2	Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun	117	kali	

4.02.4.02.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	%	<b>1.485.886.000,00</b>
	<b>DAN PRASARANA APARATUR</b>					
4.02.4.02.01.02.01	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terehabilitasi	6	unit	492.000.000,00
4.02.4.02.01.02.02	Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	4	unit	159.700.000,00
4.02.4.02.01.02.03	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	7	unit	193.200.000,00
4.02.4.02.01.02.04	Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	298	unit	640.986.000,00
4.02.4.02.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>		<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100</b>		<b>120.500.000,00</b>
	<b>SUMBER DAYA APARATUR</b>					
4.02.4.02.01.03.01	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	1	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	12	kali	120.500.000,00
4.02.4.02.01.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM</b>		<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>	<b>100</b>		<b>45.000.000,00</b>
	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN,</b>					
	<b>DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>					
4.02.4.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	4	dokumen	15.000.000,00
		2	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	dokumen	
		3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	dokumen	
4.02.4.02.01.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	3	dokumen	15.000.000,00
4.02.4.02.01.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	2	kali	15.000.000,00

---

Pada Tahun 2021 BPPKAD akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang di bidang keuangan dengan total anggaran Rp 34.274.116.160,57 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 23.977.431.015,57 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp 10.296.685.145 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **9 program dan 30 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di BPPKAD dan lingkup Kabupaten Sampang.

Inovasi BPPKAD Kabupaten Sampang dalam pengelolaan pajak, diantaranya adalah :

1. Pengembangan peta *Smartmap* berbasis web
2. SPOP PBB *On Line*

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu “ Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat ”, dan penjabaran dari tujuan BPPKAD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “ Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien”

Hasil evaluasi atas Renja BPPKAD Kabupaten Sampang tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 92% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja BPPKAD Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran BPPKAD yang telah dituangkan dalam Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan BPPKAD adalah “ Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien” yang didukung oleh sasaran yaitu: Meningkatnya PAD dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Pada tahun 2021 BPPKAD akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang di bidang keuangan dengan total anggaran Rp 34.274.116.160,57 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 23.977.431.015,57 dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.296.685.145 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 9 program dan 30 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di BPPKAD dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan Renja Tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja BPPKAD Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

- 
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
  3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

**BUPATI SAMPANG,**

**H. SLAMET JUNAIDI**



